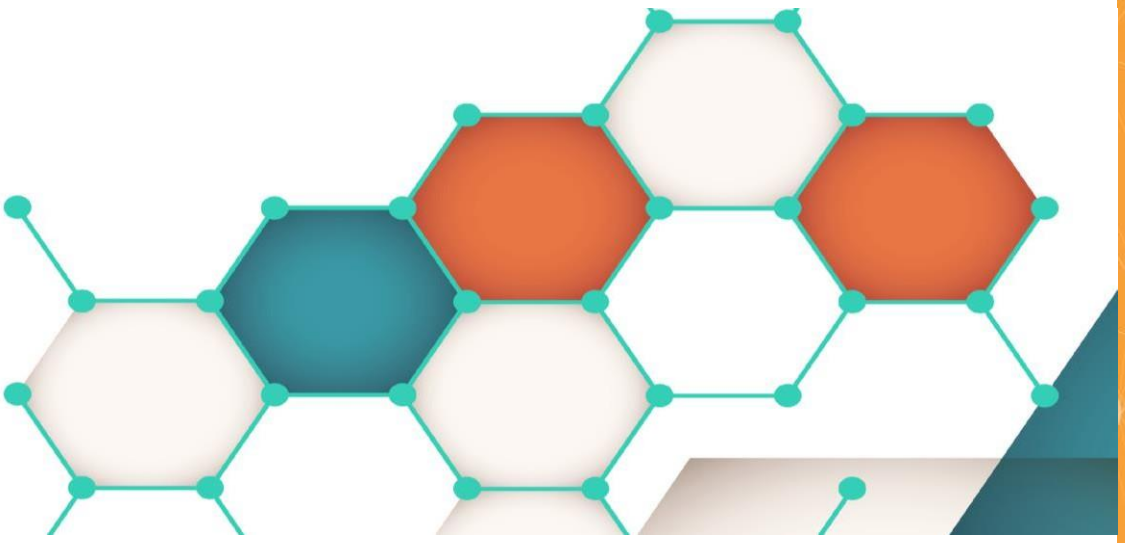
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KAYAN HILIR
TAHUN 2025 – 2029



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan Berkat, Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tahun 2025 – 2029 ini.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Kayan Hilir untuk menentukan target yang ingin dicapai dalam 5 (lima) Tahun kedepan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam pengalokasian sumber daya berupa anggaran dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra yang kami susun ini sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kayan Hilir, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029, serta sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sintang periode 2025 – 2029. Dengan Visi yaitu **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG MAJU, SEJAHTERA, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN"**, dan untuk

Kecamatan Kayan Hilir menjalankan Misi yang tercantum pada poin Nomor 3 yaitu **"Meningkatkan SDM Berkualitas Melalui Transformasi Pendidikan, Olah Raga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi, Birokrasi Pemerintahan Kaloboratif"**.

Akhir kata, semoga semua perencanaan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan dapat lebih terarah, berdaya guna, dan berhasil guna demi Kabupaten Sintang yang lebih baik.

Monbai Begununk, 10 April 2025.

Plt.Camat Kayan Hilir

SEBERIUS MATIUS AKON,S.Pd.SD.,M.E
PEMBINA IV/ A
NIP. 19690710 199110 1 002

DAFTAR ISI

			Hal.
KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
BAB I	:	**PENDAHULUAN**	1
		1.1 Latar Belakang	1
		1.2 Landasan Hukum	3
		1.3 Maksud dan Tujuan	7
		1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	:	**GAMBARAN UMUM PELAYANAN DI KECAMATAN KAYAN HILIR**	10
		2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kayan Hilir	12
		2.2 Sumber Daya Kecamatan Kayan Hilir	23
		2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kayan Hilir	29
		2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di Kecamatan Kayan Hilir	38
BAB III	:	**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DI KECAMATAN KAYAN HILIR**	42
		3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kayan Hilir	42
		3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	43
		3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	47
BAB IV	:	**TUJUAN DAN SASARAN**	49
BAB V	:	**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**	52
BAB VI	:	**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**	56
BAB VII	:	**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**	76
BAB VIII	:	**PENUTUP**	82

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sebagai suatu proses yang dilaksanakan secara terus menerus bertujuan untuk mewujudkan tercapainya tingkat kesejahteraan kehidupan masyarakat lahir dan batin. Dalam prosesnya tersebut sangat penting untuk mendayagunakan semua potensi yang ada seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, kemampuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan memperhatikan tantangan, peluang dan hambatan yang ada, baik dalam ruang lingkup lokal, nasional maupun global.

Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsinya, terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki ruang lingkup yang lebih kecil dengan konsep kewilayahan yaitu kecamatan, dengan tujuan agar tercapainya efisiensi dalam pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan dalam upaya mencapai keberhasilan Pemerintah Daerah, perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Renstra Organisasi Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD Kabupaten dan bersifat indikatif.

Mengingat bahwa Renstra Tahun 2021-2026 telah berakhir, maka disusunlah Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kayan Hilir untuk Tahun 2025-2029 yang akan menjadi acuan Kecamatan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan untuk 5 (Lima) Tahun kedepan. Renstra Kecamatan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sintang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari

visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Sintang terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Sintang pada Tahun 2024. Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Sintang, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan arah pembangunan yang lebih jelas pada seluruh stakeholder pembangunan daerah yang memenuhi aspek-aspek sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sintang untuk jangka waktu 5 tahun sesuai masa tugas bupati dan wakil bupati. Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tentunya tidak terlepas dari kerangka besar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang disusun untuk jangka waktu 2006-2026. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam perumusan program pembangunan daerah oleh bupati dan wakil bupati selaku eksekutif daerah terdapat keseimbangan antara realisasi pembangunan daerah dengan kepentingan politis dari pejabat politis daerah.

Dalam kaitannya dengan kerangka besar rencana pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia, sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat disampaikan bahwa sesungguhnya upaya pembangunan yang direncanakan untuk dapat diwujudkan sebagaimana tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sintang masih selaras dan saling sinergi dengan RPJPN dan RPJMN Republik Indonesia. Keselarasan ini dapat dilihat dengan adanya semangat yang sama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di segala bidang dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sebagai sebuah Organisasi Perangkat Daerah dan mengedepankan pelayanan masyarakat, Kecamatan Kayan Hilir telah mengupayakan penyusunan rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul selama kurun waktu dimaksud. Renstra merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah dan prima dengan selalu mengedepankan penataan dan pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Kecamatan Kayan Hilir berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik sebagai dasar penyusunan maupun sebagai hal-hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan bidang tugas dan fungsi kecamatan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kayan Hilir sebagaimana dimaksud disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabiilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
25) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
26) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
27) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang

(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

28) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan kecamatan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
2. Memberikan acuan dan pedoman dalam menyusun rencana program dan kegiatan tahunan yang transparan, terarah dan terukur sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.
3. Memberikan acuan dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan Kayan Hilir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2025 – 2029, sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Aparatur Pemerintah Kecamatan dan pelaksanaan sebagian Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
3. Sebagai panduan atau pedoman kerja bagi pimpinan, staf dan personil dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
4. Untuk membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan personil Kecamatan Kayan Hilir dalam meningkatkan kinerja organisasi.
5. Untuk merumuskan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan penataan dan pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. Pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum pentingnya penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kayan Hilir agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat sub-sub bab antara lain Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan, serta Sistematika Penulisan.

II. Gambaran Umum Pelayanan di Kecamatan Kayan Hilir, Pada bab ini dijelaskan mengenai tugas dan fungsi Kecamatan Kayan Hilir, kondisi sumber daya yang tersedia berupa sumber daya manusia dan peralatan/aset, kinerja pelayanan serta gambaran tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Kayan Hilir kedepannya.

III. Permasalahan dan isu-isu strategis di Kecamatan Kayan Hilir, menjelaskan tentang permasalahan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kayan Hilir dan isu-isu strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan memperhatikan dinamika kebijakan daerah yang dapat memberikan manfaat ataupun pengaruh di masa mendatang terhadap Kabupaten Sintang.

IV. Tujuan dan sasaran, Pada bab ini dijelaskan tentang tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kayan Hilir yang didasarkan pada RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

V. Strategi dan arah kebijakan, Pada bagian ini diuraikan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kayan Hilir dalam mencapai tujuan dan sasaran.

VI. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

VII. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, Bab ini mengemukakan indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Kayan Hilir dalam lima tahun mendatang untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

VIII. Penutup, Pada Bab ini mengungkapkan harapan mengenai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kayan Hilir untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN DI KECAMATAN KAYAN HILIR

Kecamatan Kayan Hilir merupakan 1 (satu) dari 14 (empat belas) Kecamatan yang terletak di bagian Timur Kabupaten Sintang, yaitu di pedalaman Sungai Kayan (Sungai Kayan merupakan anak dari Sungai Melawi, Nanga Sungai Kayan terletak di hilir dari Nanga Sungai Pinoh). Kecamatan Kayan Hilir terletak di antara $111^{0}36$ Bujur Timur sampai $112^{0}15$ Bujur Timur dan antara $0^{0}11$, sampai $0^{0}14$ Lintang Utara dengan Ibukota Kecamatan di Desa Monbai Begununk. Kecamatan Kayan Hilir memiliki luas wilayah $\pm$ 1.136,70 Km^2 (5,25 % dari luas Kabupaten Sintang yaitu 21.635.00 Km^2), sekitar 98,60 persen atau sekitar $\pm$ 1.120,84 Km2 merupakan lahan kering, sedangkan $\pm$ 15,86 Km2 merupakan lahan sawah, dengan batas-batas kecamatannya sebagai berikut :

(1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;
(2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi;
(3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang; dan
(4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kelam Permai dan Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang.

Pada Tahun 2025 ini, Kecamatan Kayan Hilir terdiri dari 43 Desa, yaitu sebagai berikut :

1. (Kode Desa 61.05.08.2001) : Desa Nanga Mau
2. (Kode Desa 61.05.08.2002) : Desa Jambu
3. (Kode Desa 61.05.08.2003) : Desa Tertung Mau
4. (Kode Desa 61.05.08.2004) : Desa Mentunai
5. (Kode Desa 61.05.08.2005) : Desa Tuguk
6. (Kode Desa 61.05.08.2006) : Desa Natai Tebedak
7. (Kode Desa 61.05.08.2007) : Desa Nyangkom
8. (Kode Desa 61.05.08.2008) : Desa Melingkat
9. (Kode Desa 61.05.08.2009) : Desa Nanga Tikan
10. (Kode Desa 61.05.08.2010) : Desa Pelaik

11. (Kode Desa 61.05.08.2011) : Desa Kerapa Sepan
12. (Kode Desa 61.05.08.2012) : Desa Sungai Buaya
13. (Kode Desa 61.05.08.2013) : Desa Pakak
14. (Kode Desa 61.05.08.2014) : Desa Sungai Sintang
15. (Kode Desa 61.05.08.2015) : Desa Sungai Garong
16. (Kode Desa 61.05.08.2016) : Desa Paoh Desa
17. (Kode Desa 61.05.08.2017) : Desa Jaya Sakti
18. (Kode Desa 61.05.08.2018) : Desa Mekar Mandiri
19. (Kode Desa 61.05.08.2019) : Desa Landau Beringin
20. (Kode Desa 61.05.08.2020) : Desa Karya Baru
21. (Kode Desa 61.05.08.2021) : Desa Bukit Segaloh
22. (Kode Desa 61.05.08.2022) : Desa Engkerangan
23. (Kode Desa 61.05.08.2023) : Desa Lalang Inggar
24. (Kode Desa 61.05.08.2024) : Desa Linggam Permai
25. (Kode Desa 61.05.08.2025) : Desa Sungai Menuang
26. (Kode Desa 61.05.08.2026) : Desa Natai Lesung
27. (Kode Desa 61.05.08.2027) : Desa Begendang Mal
28. (Kode Desa 61.05.08.2028) : Desa Sungai Ranap
29. (Kode Desa 61.05.08.2029) : Desa Lengkong Bindu
30. (Kode Desa 61.05.08.2030) : Desa Nanga Lidau
31. (Kode Desa 61.05.08.2031) : Desa Mengkirai
32. (Kode Desa 61.05.08.2032) : Desa Tanjung Keliling
33. (Kode Desa 61.05.08.2033) : Desa Buluk Jegara
34. (Kode Desa 61.05.08.2034) : Desa Buluk Panjang
35. (Kode Desa 61.05.08.2035) : Desa Tanjung Putar
36. (Kode Desa 61.05.08.2036) : Desa Sungai Emang
37. (Kode Desa 61.05.08.2037) : Desa Sungai Meraya
38. (Kode Desa 61.05.08.2038) : Desa Kempas Raya
39. (Kode Desa 61.05.08.2039) : Desa Ipoh Emang
40. (Kode Desa 61.05.08.2040) : Desa Sungai Pengga
41. (Kode Desa 61.05.08.2041) : Desa Batu Netak
42. (Kode Desa 61.05.08.2042) : Desa Neran Baya
43. (Kode Desa 61.05.08.2043) : Desa Monbai Begununk

Jumlah penduduk di Kecamatan Kayan Hilir ± 30.611 jiwa, dengan rasio laki-laki terhadap perempuan sebesar 109. Rasio tersebut yang nilainya lebih dari 100 menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak dari perempuan. Kepadatan Penduduk per Km^2 sekitar 22 jiwa dan kepadatan per dusun mencapai 229 jiwa.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kayan Hilir

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 132 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kecamatan Tipe A Kabupaten Sintang, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga, Urusan Sekretariat Umum, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pelayanan Umum yang berada di Kecamatan dan melaksanakan Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- Pengoordinasian Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat
- Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum
- Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan
- Pembinaan dan mengawasi Penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan / atau Kelurahan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Kabupaten yang tidak dapat dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan dan pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan

- Pelaksanaan Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pemerintahan Kecamatan
- Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan Pelimpahan sebagian Kewenangan oleh Bupati kepada Camat.

Dari tugas dan fungsi Kecamatan tersebut, diperinci sebagai berikut:

1. Camat

a. Camat mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan Pemerintahan, ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi:
   - Penyelenggaraan Kesekretariat Kecamatan
   - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   - Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
   - Pengoordinasian Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat
   - Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Kepala Daerah
   - Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum
   - Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan

yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan

- Pembinaan dan mengawasi Penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dapat dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan dan pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan
- Pelaksanaan Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pemerintahan Kecamatan
- Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan Pelimpahan sebagian Kewenangan oleh Bupati kepada Camat.

2. Sekretariat Kecamatan

a. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan meliputi urusan umum dan kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan program serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan.
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan pengelolaan urusan umum meliputi rumah tangga, surat menyurat, hubungan kemasyarakatan, dokumentasi/kearsipan dan protokol serta pengelolaan urusan kepegawaian
- Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan, meliputi urusan administrasi perlengkapan, pengadaan dan pemeliharaan serta inventarisasi perlengkapan rumah tangga kecamatan
- Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan, meliputi penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan

- Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan
- Pelaksanaan koordinasi, penyusunan program kerja dan pelaporan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan meliputi 2 Sub Bagian, yaitu :

1) Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja, serta laporan kinerja, yang meliputi perlengkapan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang, inventarisasi, pembukuan barang milik daerah yang berada di Kecamatan. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan mempunyai fungsi :
   - Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan
   - Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai
   - Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai peraturan perundang-undangan
   - Pengoordinasian persiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan
   - Pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perencanaan dan keuangan
   - Pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan

- Pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk kepentingan tugas
- Pengelolaan/pemeliharaan terhadap perlengkapan dan peralatan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
- Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Kecamatan
- Pelaksanaan penatausahaan aset Kecamatan
- Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU), dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
- Penyusunan rencana dan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan dinas
- Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan persediaan barang tiap semester dan laporan persediaan barang akhir tahun
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan dan urusan adminstrasi kepegawaian Kecamatan. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
   - Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   - Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat/naskah dinas yang telah didisposisikan oleh Camat)
   - Penyusunan bahan dan penyusunan laporan yang diperlukan pada Sekretariat Kecamatan
   - Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi surat tugas, Keputusan Camat, Surat Perjalanan Dinas (SPD), cuti, Daftar Usulan Kepangkatan, formasi dan *bezzeting* pegawai, penilaian prastasi kerja Pegawai Negeri Sipil, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan

kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, laporan pajak-pajak pribadi (SPT Online), dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan

- Pelaksanaan pengumpulan bahan dan laporan daftar hadir/absensi pegawai
- Pelaksanaan peningkatan sumber daya aparatur guna peningkatan kinerja Kecamatan
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan secara tertulis maupun lisan berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- Pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan yng berhubungan dengan tugas
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

a. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kecamatan di bidang Urusan Pemerintahan yang meliputi Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Desa/Kelurahan, serta mengoordinasikan penyelenggaraan Kecamatan.
b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi yaitu :
   - Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan
   - Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
   - Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan
   - Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan
   - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan

- Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan di bidang Pemerintahan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
- Penyusunan rencana penyelenggararaan pembinaan dan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
- Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan, Kependudukan dan Pertanahan
- Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan Desa dan peningkatan pendapatan dan Sumber Daya Pemerintahan Desa
- Pengelolaan Administrasi Pertanahan
- Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan dan pengamanan aset Pemerintah Kecamatan dan Aset Kekayaan Desa/Kelurahan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

a. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Polisi Pamong Praja, Ketahanan Masyarakat Desa, serta mengoordinasikan pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi yaitu:
    - Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
    - Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan serta pelayanan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Penyusunan program dan penyelenggaran pembinaan Polisi Pamong Praja
- Penyususnan program Pelayanan Perijinan di Wilayah Kecamatan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

a. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan mengoordinasikan peningkatan Perekonomian Masyarakat dan penyusunan rencana Pembangunan, Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana, pengendalian Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum.
b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi yaitu :
   - Penyusunan program dan pembinaan Perekonomian dan Distribusi
   - Penyusunan rencana dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Masyarakat Desa
   - Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan Urusan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa
   - Pengumpulan dan pengolahan data informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan program Perekonomian dan Pembangunan
   - Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang

berhubungan dengan bidang penyusunan program Perekonomian dan Pembangunan di Kecamatan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah

- Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan koordinasi penyusunan program Kecamatan
- Pengendalian, evaluasi dan monitoring bantuan Pembangunan dan Sarana Prasarana Kecamatan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Kesejahteraan Masyarakat, melakukan usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Berencana dan pembinaan di bidang Agama termasuk Urusan Haji, Pendidikan, dan Kebudayaan serta pembinaan di bidang kegiatan Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenagakerjaan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan Kesejahteraan Masyarakat.

b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi yaitu :

- Penyusunan program, pembinaan Pelayanan dan Bantuan Sosial, pembinaan Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat
- Penyusunan rencana pembinaan Pelayanan dan Bantuan Sosial, pembinaan Kepemudaan, Peranan Wanita dan Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat
- Penyusunan rencana pembinaan Kehidupan Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Masyarakat
- Penyusunan rencana dan pembinaan di bidang Sumber Daya Desa
- Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan

penyelenggaraan Urusan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dan Sumber Daya Masyarakat Desa

- Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Urusan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat
- Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
- Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan Usaha Peningkatan Mutu Gizi Makanan Rakyat
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pelayanan Umum

a. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan Umum yang meliputi semua Urusan Pelayanan Umum, Kekayaan, Inventarisasi Kecamatan, Kebersihan serta Sarana dan Prasarana Umum.
b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi yaitu :
   - Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Pelayanan dan Inventarisasi Kekayaan Kecamatan
   - Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan Urusan pelayanan Kebersihan, Keindahan, Pertamanan dan Sanitasi Lingkungan
   - Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan Urusan Pelayanan Perizinan
   - Penyusunan rencana dan pembinaan Pelayanan Umum
   - Penyusunan laporan penyelenggaraan Urusan Kekayaan dan Inventaris Desa/Kelurahan, Kebersihan, Perizinan dan Fasilitas Umum

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Selain itu, Kelompok Jabatan Fungsional ini terdiri dari sejumlah tenaga dengan jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Camat. Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Yang mana jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana uraian diatas, Struktur Organisasi Kecamatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Kayan Hilir terdiri dari :

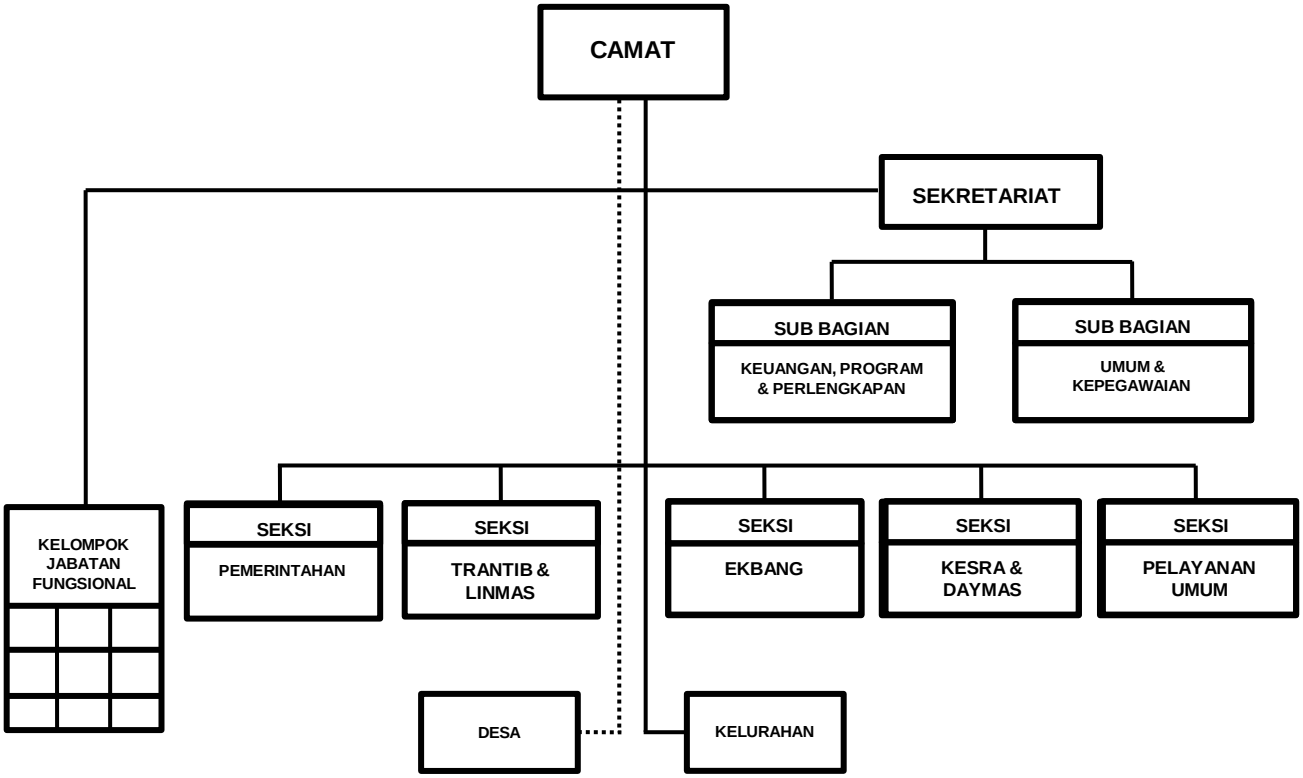
1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Kedudukan

a) Kecamatan merupakan Unsur Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
c) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
d) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Visualisasi Struktur Organisasi Kecamatan Kayan Hilir dapat dilihat pada Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya Kecamatan Kayan Hilir

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Kecamatan Kayan Hilir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 20 Pegawai Negeri Sipil. Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Kayan Hilir berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pangkat/Golongan Ruang, dan lain-lain dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi PNS Kecamatan Kayan Hilir menurut Jenis Kelamin
(keadaan 10 April 2025)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	16
2	Perempuan	4
Jumlah		**20**

Tabel 2.2
Komposisi PNS Kecamatan Kayan Hilir menurut Usia
(keadaan 10 April 2025)

No	Usia	Jumlah
1	18 s.d. 35 Tahun	2
2	36 s.d. 50 Tahun	10
3	51 s.d. 57 Tahun	8
Jumlah		**20**

Tabel 2.3
Komposisi PNS Kecamatan Kayan Hilir menurut Pangkat/Golongan Ruang
(keadaan 10 April 2025)

No.	Pangkat / Gol. Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Pembina / (IV/a)	1	-	1
2.	Penata Tingkat I / (III/d)	2	-	2
3.	Penata / (III/c)	-	2	2
4.	Penata Muda Tingkat I / (III/b)	5	-	5
5.	Penata Muda / (III/a)	1	-	1
6.	Pengatur Tingkat I / (II/d)	2	1	3
7.	Pengatur / (II/c)	2	-	2
8.	Pengatur Muda Tingkat I / (II/b)	2	1	3
9.	Juru / (I/c)	1	-	1
Jumlah		16	4	**20**

Tabel 2.4

Pendidikan PNS Kecamatan Kayan Hilir per Golongan Ruang
(keadaan 10 April 2025)

No.	Golongan	Pendidikan								Jumlah
		SD/SD Sederajat	SMP/ SMP Sederajat	SMA/ SMA Sederajat	D-II	D-III	S1	S2	S3	
1.	Golongan IV	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.	Golongan III	-	-	1	1	1	7	-	-	10
3.	Golongan II	-	-	8	-	-	-	-	-	8
4.	Golongan I	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah		1	-	9	1	1	7	1	-	**20**

Tabel 2.5

Komposisi PNS Kecamatan Kayan Hilir menurut Jabatan Struktural
(keadaan 10 April 2025)

No.	Jabatan	Eselon	Alokasi Jabatan Defenitif	Jumlah Jabatan yang terisi
1.	Camat	III.a	1	-
2.	Sekretaris Kecamatan (Sekcam)	III.b	1	1
3.	Kepala Seksi (Kasi)	IV.a	5	3
4.	Kepala Sub Bagian (Kasubbag)	IV.b	2	2
Jumlah			**9**	**6**

Tabel 2.6

Pendidikan Pejabat Struktural di Kecamatan Kayan Hilir
(keadaan 10 April 2025)

No.	Eselon	Pendidikan						Jumlah
		SMA/ SMA Sederajat	D-II	D-III	S1	S2	S3	
1.	Eselon III.a	-	-	-	-	-	-	-
2.	Eselon III.b	-	-	-	-	1	-	1
3.	Eselon IV.a	-	-	1	2	-	-	3
4.	Eselon IV.b	-	-	-	2	-	-	2
Jumlah		-	-	1	4	1	-	**6**

Tabel 2.7

PNS Kecamatan Kayan Hilir yang telah mengikuti Diklat Struktural
(keadaan 10 April 2025)

No.	Jenis Diklat Struktural	Jumlah
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	-
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	1
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	5
Jumlah		**6**

Tabel 2.8

Jumlah PNS yang akan pensiun sampai Tahun 2026
(Tahun akhir Renstra)

No.	Tahun Pensiun	Jumlah
1.	Tahun 2025	-
2.	Tahun 2026	-
3.	Tahun 2027	6
4.	Tahun 2028	1
5.	Tahun 2029	-
Jumlah		**7**

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan Sarana dan Prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kayan Hilir.

Untuk saat ini, terkhusus tempat/bangunan untuk melaksanakan aktivitas Rapat sebagaimana mestinya di Kecamatan Kayan Hilir dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, karena Gedung Serba Guna Kecamatan Kayan Hilir sudah Lama belum di rehap . Sehingga untuk tetap dapat melaksanakan pertemuan terkadang mengunakan Gedung kantor kecamatan kayan Hilir yang baru, yang seyogyannya dilaksana kan di gedung Pertemuan atau Gedung Serbaguna. Sudah selayaknya dilakukan rehabilitasi, mengingat kondisinya memang sudah Lama belum di Rehap dan Memerlukan rehap Berap.

Secara umum, Kecamatan Kayan Hilir sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk mendukung seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sehingga meskipun tidak memiliki Kantor yang layak, seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Kayan Hilir diusahakan untuk tetap dapat berjalan secara normal dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Adapun jenis Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Kayan Hilir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Kayan Hilir
(keadaan 10 April 2025)

1. Bangunan/Gedung

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	Gedung Kantor	1	B	-	-
2	Rumah Dinas Camat	1	-	KB	-
3	Rumah Dinas Staf	3	-	KB	-
4	Gedung Serba Guna	1	-	KB	-
5	Gedung Garasi	1	-	-	RB

2. Peralatan dan Mesin

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	Kendaraan Dinas Roda 4	1	-	KB	-
2	Kendaraan Dinas Roda 2	10	2	6	2
3	Komputer	5	-	1	4
4	Laptop	9	7	1	1
5	Printer	9	6	2	1
6	Radio SSB	1	-	1	-
7	Radio IC 2100	1	-	1	-
8	Antena MF/ Fortable	1	-	1	-
9	Mesin Genset	1	-	1	-
10	Mesin Tebas Rumput	2	1	-	-

3. Perlengkapan Kantor

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	Meja Kerja Lokal	8	5	3	-
2	Meja kerja Pejabat	10	5	-	5
3	Meja Kerja Lokal ½ Biro	1	1	-	-
4	Meja Kerja Pejabat 1 Biro	18	8	5	5
5	Kursi Kerja Futura	40	20	10	10
6	Kursi Kerja Pejabat Eselon	10	6	2	2
7	Kursi Tamu Kantor	1	1	-	-
8	Tong Air	2	2	-	-
9	Lemari Kayu	6	3	-	3
10	Lemari Arsip Lokal	5	5	-	-
11	Proyektor	1	1	-	-
12	Sound System	1	1	-	-
13	AC	2	2	-	-
14	Termogun	4	4	-	-
15	Mesin Ketik (Olympia)	1	-	-	1
16	Kalkulator	5	2	-	3
17	Kipas Angin	5	3	2	-

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kayan Hilir

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kayan Hilir dan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dapat diberikan gambaran terkait dengan tingkat Capaian Kinerja Pelayanan dan Realisasi Anggaran Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kayan Hilir pada Renstra sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kayan Hilir
Kabupaten Sintang

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK/ SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya (RPJMD)	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal				Orang	3	3	3	3	3	1	1	2	0	0	33,33%	33,33%	66,66%	0%	0%
2	Jumlah ASN yang diambil Sumpah/Janji dan dilantik dalam Jabatan Struktural				Orang	0	0	0	2	6	0	0	1	0	0	0%	0%	100%	0%	0%
3	Jumlah pakaian dinas yang disediakan				Stel	27	27	27	27	27	0	0	27	0	0	0%	0%	100%	0%	0%
4	Jumlah materai yang disediakan				Lembar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah bulan penyediaan listrik				Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah porsi konsumsi tamu yang disediakan				Porsi	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
7	Jumlah sarana prasarana kantor, Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan				Buah	10	10	10	10	10	10	10	10	5	2	100%	100%	100%	50%	20%
8	Jumlah jenis mebel yang disediakan				Buah	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	100%	100%	100%	66,66%	33,33%
9	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan				Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
10	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan				Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti				Kali	120	120	120	120	120	120	120	120	100	80	100%	100%	100%	83,33%	66,66%
12	Jumlah jenis ATK yang disediakan				Jenis	45	45	45	45	45	45	45	45	30	30	100%	100%	100%	66,66%	66,66%
13	Jumlah tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				Orang	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	100%	100%	100%	85,71%	85,71%

14	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
15	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				Unit	6	6	6	6	6	5	2	1	0	0	83,33%	33,33%	16,66%	0%	0%
16	Jumlah barang cetakan yang disediakan				Jenis	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%
17	Jumlah komponen listrik yang disediakan				Jenis	5	5	5	5	5	5	5	2	0	0	100%	100%	40%	0%	0%
18	Jumlah makanan & minuman yang disediakan				Porsi	200	200	200	200	200	200	200	180	180	160	100%	100%	90%	90%	80%
19	Jumlah jenis peralatan pembersih yang disediakan				Jenis	10	10	10	10	10	10	5	2	0	0	100%	50%	20%	0%	0%
20	Jumlah desa yang akan dilakukan pembinaan dan pengawasan				Desa	43	43	43	43	43	43	43	43	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
21	Jumlah bulan penyediaan Kebersihan Kantor				Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
22	Jumlah tenaga pendukung keamanan yang disediakan				Orang	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
23	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan				Unit	11	11	11	11	11	2	1	0	0	0	18,18%	9,09%	0%	0%	0%
24	Jumlah sound system yang disediakan				Set	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0%	100%	0%	0%	0%
25	Jumlah bangunan yang akan direhabilitasi atau direnovasi				Buah	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
26	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat				Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
27	Jumlah desa sasaran fasilitasi pungutan PBB				Desa	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	100%	100%	100%	100%	100%
28	Jumlah desa sasaran fasilitasi perekaman KTP-el				Desa	10	10	10	10	10	10	4	2	5	0	100%	40%	20%	50%	0%
29	Jumlah kegiatan Pembinaan Kerukunan yang dilaksanakan				Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	100%	100%	100%	100%	0%
30	Jumlah rapat koordinasi fasilitasi masalah perkebunan yang dilaksanakan				Kegiatan	6	6	6	6	6	6	6	2	1	0	100%	100%	33,33%	16,66%	0%
31	Jumlah kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan				Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	100%	100%	100%	100%	0%

32	Jumlah desa sasaran Sinergisitas Ketentraman dan Ketertiban				Desa	10	10	10	10	10	10	10	10	5	0	100%	100%	100%	50%	0%
33	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan PATEN				Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
34	Jumlah kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan				Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
35	Jumlah kegiatan Peringatan HUT RI yang dilaksanakan				Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
36	Jumlah desa sasaran fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				Desa	43	43	43	43	43	43	43	43	20	0	100%	100%	100%	46,51%	0%
37	Jumlah desa yang difasilitasi Pilkades				Desa	0	2	0	0	39	0	2	0	0	39	0%	100%	0%	0%	100%
38	Jumlah Desa sasaran fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan				Desa	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	100%	100%	100%	100%	100%
39	Jumlah Desa yang dilakukan pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat				Desa	1	1	2	2	2	1	1	2	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
40	Jumlah desa sasaran Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				Desa	43	43	43	43	43	43	43	20	0	0	100%	100%	46,51%	0%	0%
41	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Rapat Kerja dengan Camat				Desa	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	100%	100%	100%	100%	100%
42	Jumlah desa yang difasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				Desa	5	5	5	5	5	4	5	2	0	0	80%	100%	40%	0%	0%
43	Jumlah desa sasaran peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				Desa	43	43	43	43	43	43	43	20	0	0	100%	100%	46,51%	0%	0%
44	Jumlah desa sasaran sinkronisasi program kerja antara Pemerintah dengan Pihak Swasta				Desa	43	43	43	43	43	43	43	20	0	0	100%	100%	46,51%	0%	0%
45	Jumlah desa sasaran kegiatan pembinaan PKK				Desa	5	5	5	5	5	5	5	2	0	0	100%	100%	40%	0%	0%

46	Jumlah desa yang mengikuti Lomba Desa				Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
47	Jumlah desa sasaran pembinaan trantib				Desa	10	10	10	10	10	10	10	5	0	0	100%	100%	50%	0%	0%
48	Jumlah Kegiatan penunjang Pemilu yang dilaksanakan				Kegiatan	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0%	100%	100%	100%	0%
49	Jumlah kegiatan pembinaan Generasi Muda, Kepramukaan, Kebudayaan & Peranan Wanita yang dilaksanakan				Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	100%	100%	100%	50%	0%
50	Jumlah kegiatan Kompetisi Olahraga Tradisional yang dilaksanakan				Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
51	Jumlah Sekolah yang dimonitor dalam penyelenggaraan pendidikan dan tenaga pendidik di tingkat Kecamatan (KIAT Guru)				Sekolah	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100%	100%	100%	0%	0%

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Kayan Hilir
Kabupaten Sintang

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Ratio Realisasi Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan		Keterangan
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,236,756,256	2,398,298,588	2,427,904,520	2,208,224,790	2,288,478,360	2,215,671,152	2,378,718,520	2,413,364,257	2,150,322,601	2,026,064,666	99.06%	99.18%	99.40%	97.38%	88.53%	0.46%	-1.77%	Belanja Tidak Langsung
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	19,305,000	-	-	-	-	19,305,000	-	-	-	-	100%	-	-	0%	0%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20,767,500	20,767,500	43,535,000	-	-	20,767,500	20,767,500	43,535,000	-	-	100%	100%	100%	-	-	15.96%	15.96%	Pendidikan dan Pelatihan Formal
Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,000,000	23,000,000	26,220,000	26,220,000	21,762,600	19,000,000	22,000,000	25,850,000	25,900,000	21,762,600	95%	96%	99%	99%	100%	1.70%	2.75%	Makan Minum Tamu
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,089,300	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,089,300	100%	100%	100%	100%	100%	0.10%	0.10%	Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,000,000	2,500,000	-	-	-	2,000,000	2,500,000	-	-	-	100%	100%	-	-	-	4.56%	4.56%	Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35,000,000	35,000,000	38,645,000	38,645,000	43,470,610	33,600,000	34,000,000	37,645,000	38,645,000	43,470,610	96%	97%	97%	100%	100%	4.43%	5.29%	(1) Penyediaan BBM dan Gas (2) Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat (3) Peringatan HUT RI
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2,000,000	1,500,000	-	-	-	2,000,000	1,500,000	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-5.59%	-5.59%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203,825,000	203,825,000	235,105,000	186,202,542	66,450,000	203,825,000	203,825,000	167,655,500	186,195,000	66,450,000	100%	100%	71%	100%	100%	-20.08%	-20.08%	Rapat2 Koordinasi dan kosultasi dalam daerah dan ke luar daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35,000,000	18,000,000	-	-	-	35,000,000	18,000,000	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-12.45%	-12.45%	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	0%	0%	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer, Pengadaan Peralatan dan Mesin
Pengadaan Mebel	-	-	30,000,000	30,000,000	29,500,000	-	-	30,000,000	30,000,000	29,500,000	-	-	100%	100%	100%	-0.34%	-0.34%	Pengadaan Meja, Kursi, Lemari, dll
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600,000	600,000	600,000	600,000	-	600,000	600,000	600,000	600,000	-	100%	100%	100%	100%	-	0%	0%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,800,000	100,800,000	100,800,000	109,800,000	106,085,000	100,200,000	100,700,000	100,800,000	108,800,000	105,655,000	99%	100%	100%	99%	100%	1.03%	1.07%	Penyediaan Tenaga Kontrak

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10,000,000	-	-	-	-	9,950,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	0%	0%	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,000,000	-	-	-	-	3,980,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	0%	0%	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	10,000,000	10,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	100%	100%	100%	100%	-7.79%	-7.79%	Pelaksanaan Pungutan atas Pajak dan Retribusi Daerah di Wilayah Kerjanya
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	79,182,000	79,182,000	79,182,000	3,525,000	-	79,182,000	79,182,000	79,182,000	3,525,000	-	100%	100%	100%	100%	-	-46.33%	-46.33%	(1) Pekan Olah Raga Seni dan Budaya (2) Gawai Dayak (3) Bupati Cup (4) KIAT Guru (5) Operasi Pasar (6) Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin (7) MTQ Kabupaten (8) PATEN

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14,435,200	14,435,200	14,500,000	4,950,000	-	14,235,200	14,435,200	14,500,000	4,950,000	-	99%	100%	100%	100%	-	-19.27%	-19.04%	(1) Penyelenggaraan lomba Desa, (2) Pembinaan PKK
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	14,075,000	36,165,200	10,000,000	10,000,000	-	14,000,000	36,165,200	10,000,000	10,000,000	-	99%	100%	100%	100%	-6.61%	-6.51%	(1) Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban dan Kemasyarakatan (2) Penunjang Pemilu
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																		
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28,025,000	28,025,000	28,025,000	25,000,000	10,510,000	27,025,000	27,800,000	28,025,000	25,000,000	10,510,000	96%	99%	100%	100%	100%	-17.81%	-17.21%	Koordinasi Pemecahan Masalah Perkebunan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	57,630,000	57,630,000	57,630,000	50,000,000	15,435,000	55,500,000	56,630,000	57,630,000	50,000,000	15,435,000	96%	98%	100%	100%	100%	-23.16%	-22.58%	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Administrasi Keuangan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	4,000,000	-	-	30,020,000	-	3,900,000	-	-	30,015,000	-	98%	-	-	100%	49.65%	50.40%	Sosialisasi Pelakasanaan Pemilihan Kepala Desa serentak
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13,105,000	13,105,000	13,105,000	15,000,000	15,000,000	12,100,000	12,200,000	12,950,000	15,000,000	15,000,000	92%	93%	99%	100%	100%	2.74%	4.39%	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Berdasarkan data-data sebagaimana termuat didalam tabel tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa cukup banyak Program dan Kegiatan yang tidak terealisasi berdasarkan Target yang telah ditetapkan pada Renstra sebelumnya, hal ini terjadi karena beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Khusus pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, terjadi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan dilakukannya Refocusing Anggaran yang sangat ekstrim dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 secara nasional, sehingga beberapa Kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak tersedianya anggaran.
2. Anggaran yang tersedia hanya diprioritaskan untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyediaan kebutuhan Kantor yang sangat mendasar seperti penyediaan alat tulis kantor, makan dan minum, penyediaan listrik dan air. Selain itu, tidak tersedia anggaran untuk melaksanakan Program dan Kegiatan lainnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di Kecamatan Kayan Hilir

Kecamatan Kayan Hilir dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Barat , hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang agar dapat bersinergi dan memiliki kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang.

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Kayan Hilir dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan

1. Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, sehingga berimbas pada anjloknya anggaran Pemerintah dan semakin menurunnya perekonomian masyarakat.
2. Tuntutan pelayanan yang beragam dari masyarakat yang harus ditampung dan dilayani secara cepat dan akurat.
3. Belum tersedianya Fasilitas dan Sarana penunjang kerja yang memadai bagi Aparatur Kecamatan.
4. Tidak tersedianya Kantor Kecamatan di Kecamatan Kayan Hilir.
5. Masih kurangnya kemampuan Sumber Daya Pegawai Kecamatan dalam melayani masyarakat.
6. Bervariasinya Tingkat Pendidikan, Sosial dan Ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
7. Dengan banyaknya investor di bidang perkebunan, akan sangat berpotensi terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak investor/perusahaan.
8. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai Kecamatan.
9. Belum terpenuhinya kualitas sumber daya pegawai Kecamatan.
10. Masih Rendahnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundangan-undangan yang ada.
12. Rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
13. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam manajerial ekonomi keluarga.
14. Belum memadainya sarana dan prasarana infrastruktur dan jaringan komunikasi di desa-desa.

15. Masih rendahnya kemampuan dan kompetensi aparatur desa dalam mengelola administrasi pemerintahan desa dan keuangan desa.
16. Masih rendahnya pemahaman aparatur Desa tentang Tugas Pokok dan Fungsi, sehingga menimbulkan banyak permasalahan/kasus antara Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Masyarakat.
17. Masih relatif terbatasnya kemampuan pemerintah desa dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa.
18. Masih rendahnya rata-rata tingkat pendidikan dan penguasaan IPTEK oleh masyarakat.
19. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran (pengangguran terbuka dan terselubung).

2.4.2. Peluang

1. Adanya Kewenangan yang dimiliki Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Bupati.
2. Besarnya komitmen Kecamatan Kayan Hilir dalam rangka menciptakan Pelayanan Publik yang baik di Kecamatan Kayan Hilir.
3. Terjadinya hubungan yang harmonis antar Unsur Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) sehingga terciptanya koordinasi dan soliditas yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kayan Hilir.
4. Tingginya antusiasme masyarakat dalam menerima pembangunan-pembangunan dari pemerintah.
5. Adanya kekompakan dan motivasi kerja Staf Kecamatan yang cukup tinggi.
6. Masih tersedianya peluang-peluang pengembangan ekonomi masyarakat secara mandiri dalam bidang perkebunan, perikanan, pertanian, peternakan dan lain-lain.

7. Ibukota Kecamatan Kayan Hilir menjadi Pusat pertumbuhan ekonomi baru yang ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan, Perbankan, Koperasi, dan lain-lain.
8. Masih tersedianya kucuran dana APBN bagi Desa-Desa di Kecamatan Kayan Hilir, yang diharapkan dapat mendorong status desa menjadi Desa yang maju dan mandiri demi terwujudnya kemandirian ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat pedesaan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DI KECAMATAN KAYAN HILIR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kayan Hilir.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di Kecamatan Kayan Hilir tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Ada beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi, antara lain :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pelayanan Kantor Kecamatan Kayan Hilir

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum maksimalnya pelayanan kepada masyarakat	▪ Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang kinerja	▪ Terbatasnya anggaran dan operasional Kecamatan ▪ Masih rendahnya kualitas SDM Aparatur Kecamatan
2.	Belum optimalnya pelaksanaan Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kepada pemerintahan desa	▪ Daerah binaan yang luas dengan jumlah desa yang banyak	▪ Terbatasnya anggaran dan operasional Kecamatan ▪ Belum memadainya sarana dan prasarana infrastruktur dan jaringan komunikasi ke desa-desa

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk di wujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* agar secara bersama-sama dan sinergis membangun daerah. Visi pembangunan ini merupakan kondisi akhir daerah yang dikehendaki oleh *stakeholders* di Kabupaten Sintang dalam periode 2025-2029.

Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 adalah :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG MAJU, SEJAHTERA, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN."

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas Antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang;
2. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi Melalui Kemudahan Investasi, Pengembangan Produk Lokal, Pengendalian Inflasi, Stabilitas Ketersediaan Pangan serta Optimalisasi Pendapatan Daerah;
3. Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kolaboratif;
4. Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Melalui Peningkatan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Menuju Ekonomi Hijau.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Identifikasi Permasalahan menurut Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kayan Hilir, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka isu-isu Strategis yang dihadapi Kecamatan Kayan Hilir adalah sebagai berikut :

a. Terbatasnya anggaran dan operasional Kecamatan.

b. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang kinerja Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan publik.
c. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur Kecamatan dalam memberikan pelayanan publik.
d. Pola pembinaan pegawai yang belum maksimal menyebabkan rendahnya komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

e. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembinaan Pemerintah Desa serta pengawasan dan evaluasi program-program pembangunan belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan dan kompetensi aparatur desa dalam mengelola administrasi pemerintahan desa dan keuangan desa, serta masih rendahnya pemahaman aparatur Desa tentang Tugas Pokok dan Fungsi, sehingga menimbulkan banyak permasalahan/kasus antara Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Masyarakat.
f. Pesatnya teknologi informasi berdampak pada masalah-masalah sosial sehingga akan menyebabkan ancaman serius terhadap generasi muda dalam hal ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
g. Masuknya investor terutama pihak yang berinvestasi di bidang perkebunan kelapa sawit selain bertujuan untuk berkontribusi mensejahterakan masyarakat sekitar, disisi yang lain juga membawa persoalan dengan timbulnya potensi konflik. Konflik tersebut antara lain berupa munculnya sengketa batas wilayah antar Desa, pembagian lahan kepada petani dan lain sebagainya.
h. Belum memadainya sarana dan prasarana infrastruktur dan jaringan komunikasi ke desa-desa.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Misi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kayan Hilir untuk 5 (lima) Tahun kedepan adalah menjalankan Misi 3, yaitu Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kolaboratif.

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan di Kecamatan Kayan Hilir beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Kecamatan Kayan Hilir

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN PADA TAHUN				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Melakukan Reformasi Birokrasi dan Optimalisasi Pelayanan Publik di Kecamatan Kayan Hilir	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP	Point	-	-	72.00	75.00	78.00	80.00
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	-	-	85	87	88	90
		Meningkatkan Status Desa	Persentase Desa Mandiri	Persen	-	-	50	60	70	75

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi dan misi pembangunan daerah sesungguhnya merupakan untaian harapan masa depan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Harapan dapat diraih manakala visi dan misi realistis sesuai situasi dan kondisi daerah yang sudah, sedang terjadi, dan kecenderungan perkembangan masa depan. Untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang telah ditetapkan.

Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan posisi Kabupaten Sintang yang diukur dari berbagai indikator, seperti Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni, dan lain-lain, serta dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Kecamatan Kayan Hilir sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sintang dengan segala tugas, fungsi dan kewenangan yang ada, tentunya harus mampu menyelaraskan dan bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam upaya mewujudkan dan meralisasikan visi, misi dan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Dalam kaitannya dengan hal sebagaimana dimaksud, maka merupakan hal yang juga penting untuk menetapkan strategi-strategi yang akan dilaksanakan

oleh Kecamatan Kayan Hilir untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun strategi-strategi tersebut antara lain :

1. Strategi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur.

   Adalah suatu strategi yang terfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan pada Kantor Camat Kayan Hilir yang dapat diukur melalui indikator transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Strategi ini diarahkan pada upaya menumbuhkembangkan peran dan fungsi pemerintahan pada kantor camat kayan hilir melalui pengembangan sumberdaya aparatur, pengembangan tata kerja yang terukur dan akuntabel, penetapan standar operasional pelayanan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja dan melaksanakan rapat-rapat kordinasi dan evaluasi kerja secara berkala .

2. Strategi Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

   Adalah suatu strategi yang terfokus pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik atau masyarakat disegala bidang yang menjadi kewenangan Kantor Kecamatan Kayan Hilir sesuai dengan standart pelayanan prima atau paling tidak sesuai dengan standart pelayanan minimum sehingga dapat tercapai indeks kepuasan publik/masyarakat sebagaimana yang dikehendaki. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas (cakupan) pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil, kepegawaian, perizinan, dan rekomendasi-rekomendasi terutama yang berhubungan dengan proses keuangan pemerintah desa melalui upaya perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan serta penetapan standart operasional prosedur (SOP) pelayanan yang lebih mengedepankan isu-isu efisiensi dan kemudahan dalam prosesnya. Selain itu, strategi ini juga dalam rangka peningkatan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya, instansi vertikal dan dengan Unsur Pimpinan yang ada di Kecamatan (Forkopimcam), serta melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

3. Strategi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa dan BPD.

   Adalah suatu strategi yang terfokus pada upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dalam wilayah kerja Kecamatan Kayan Hilir sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat diukur dengan indeks kepuasan masyarakat, tertib administrasi pemerintahan desa dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di desa. Selain itu, strategi ini juga diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis administrasi aparatur pemerintah desa, transparansi proses pelayanan dan tata kelola keuangan serta partisipasi masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan desa, meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparatur desa dalam mengelola administrasi pemerintahan desa dan keuangan desa, mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, melalui upaya-upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan melaksanakan rapat-rapat kerja dan bimtek, juga melaksanakan pendampingan, pembinaan, monitoring serta evaluasi terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemerintah desa. Dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman aparatur Desa tentang Tugas Pokok dan Fungsi, sehingga dapat meminimalisir munculnya permasalahan/kasus antara Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Masyarakat. Selain peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa, strategi ini juga terfokus pada upaya mengoptimalkan peran dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan proses pemerintahan dan pembangunan di desa, sehingga diharapkan dapat tercipta harmonisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Strategi ini diarahkan pada upaya menumbuhkembangkan lembaga BPD sebagai mitra kerja pemerintah dan saluran aspirasi masyarakat desa, melalui upaya-upaya peningkatan kapasitas dengan rapat-rapat kerja/koordinasi, konsultasi dan fasilitasi penyelesaian masalah di tingkat desa.

Untuk melihat Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2025-2029

VISI	:	TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG MAJU, SEJAHTERA, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN
MISI 3	:	Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kolaboratif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Optimalisasi Pelayanan Publik di Kecamatan Kayan Hilir	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**	**Meningkatkan Pemahaman SAKIP SDM**	Mendorong terlaksananya Implementasi SAKIP
			Memanfaatkan Tim Kerja dalam Penyusunan SAKIP
		Menetapkan dan Menerapkan SOP Pelayanan	Menyederhanakan Prosedur Pelayanan
			Memanfaatkan Teknologi Informasi
	Meningkatkan Status Desa	**Meningkatkan Sumber Daya Pemerintahan di Kecamatan dan Desa**	Meningkatkan Status Desa dari Maju Menjadi Desa Mandiri
			Meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dalam Merencanakan, Menganggarkan dan Melaksanakan Pembangunan dan Pengawasan hasil Pembangunan untuk kesejahteraan warga desanya

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan Kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah guna mencapai Sasaran dan Tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan Kebijakan/Program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa Kegiatan dimana Kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu Program. Dengan kata lain Rencana Program perlu dijabarkan ke dalam Kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas Kelompok Sasarannya, dan juga terdapat Perencanaan Anggarannya. Selain itu, penting pula untuk dilakukan Pengukuran Indikator Kinerja, Pengukuran Indikator Kinerja sangat berguna sebagai Pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan. Dengan berpedoman pada Indikator Kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Kemudian penting pula untuk mencantumkan Kelompok Sasaran dan Pendanaan dari kegiatan yang dilaksanakan, Kelompok Sasaran dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kayan Hilir meliputi Internal Kecamatan, instansi lain dan masyarakat yang terlibat dan berkepentingan dalam kegiatan tersebut. Sedangkan Pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kayan Hilir bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Sintang.

Rencana Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kayan Hilir pada Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
   a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
   c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kantor Kecamatan Kayan Hilir adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kantor Kecamatan Kayan Hilir

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.1	Melakukan Reformasi Birokrasi dan Optimalisasi Pelayanan Publik di Kecamatan Kayan Hilir	1.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA**		**2.562.835.870**	100%	**2.541.526.072**	100%	**2.553.391.782**	100%	**2.641.812.840**	100%	**2.700.134.431**	100%	**2.713.599.244**	100%	**2.688.718.758**	**Kantor Kecamatan Kayan Hilir**	**Kayan Hilir**
			7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.000.000**	100%	**3.000.000**	100%	**3.000.750**	100%	**3.001.500**	100%	**3.002.251**	100%	**3.003.001**	100%	**3.003.752**	**Kantor Kecamatan Kayan Hilir**	**Kayan Hilir**
			7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan yang diselesaikan	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.750	1 Dokumen	3.001.500	1 Dokumen	3.002.251	1 Dokumen	3.003.001	1 Dokumen	3.003.752	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
					Hasil : Terlaksanany a Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.288.478.360**	100%	**2.237.739.172**	100%	**2.238.298.607**	100%	**2.241.058.181**	100%	**2.241.617.896**	100%	**2.242.177.750**	100%	**2.242.737.745**	**Kantor Kecamatan Kayan Hilir**	**Kayan Hilir**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.288.478.360	12 Bulan	2.232.739.172	12 Bulan	2.233.297.357	12 Bulan	2.233.855.681	12 Bulan	2.234.414.145	12 Bulan	2.234.972.749	12 Bulan	2.235.531.492	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
		Hasil : Terlaksanany a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Keluaran : - Jumlah Buku Cek	-	-	-	-	-	4 Buku	400.000	4 Buku	400.000	4 Buku	400.000	4 Buku	400.000	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
		Keluaran : - Jumlah Pulsa OPT		-	-	-	-	12 Bulan	1.800.000	12 Bulan	1.800.000	12 Bulan	1.800.000	12 Bulan	1.800.000		
		Hasil : Terlaksanany a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang diselesaikan	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.001.250	1 Dokumen	5.002.500	1 Dokumen	5.003.751	1 Dokumen	5.005.002	1 Dokumen	5.006.253	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
		Hasil : Terlaksanany a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	-	**-**	-	**-**	100%	**53.735.000**	100%	**18.768.000**	100%	**37.535.000**	100%	**34.968.000**	**Kantor Kecamatan Kayan Hilir**	**Kayan Hilir**

7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran :	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya yang disediakan	-	-	-	-	-	27 Stel	16.200.000	0	-	0	-	27 Stel	16.200.000	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
		Hasil :	Terlaksanany a Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%		
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran :	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat berdasarkan Tugas dan Fungsinya	-	-	-	-	-	2 Orang	37.535.000	1 Orang	18.768.000	2 Orang	37.535.000	1 Orang	18.768.000	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
		Hasil :	Terlaksanany a Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**149.772.510**	100%	**151.301.900**	100%	**151.339.725**	100%	**163.390.060**	100%	**160.917.780**	100%	**164.470.509**	100%	**160.998.249**	**Kantor Kecamatan Kayan Hilir**	**Kayan Hilir**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran :	Jumlah jenis Komponen Listrik yang disediakan	-	-	-	-	-	5 Jenis	1.000.000	-	-	10 Jenis	2.000.000	-	-	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
		Hasil :	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran :	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	18.089.300	45 Jenis	18.089.300	45 Jenis	18.093.822	45 Jenis	18.098.346	45 Jenis	18.102.870	45 Jenis	18.107.396	45 Jenis	18.111.923	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
		Hasil :	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran :	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	-	-	-	-	-	17 Jenis	1.512.500	-	-	17 Jenis	1.512.500	-	-	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
		Hasil :	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran :	Jumlah Bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.470.610	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	45.011.250	12 Bulan	45.022.503	12 Bulan	45.033.758	12 Bulan	45.045.017	12 Bulan	45.056.278	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
		Hasil :	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran :	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	-	-	12 Bulan	9.500.000	12 Bulan	9.502.375	12 Bulan	9.504.751	12 Bulan	9.507.127	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
		Hasil :	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keluaran :	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi kunjungan tamu	21.762.600	12 Bulan	21.762.600	12 Bulan	21.768.041	12 Bulan	21.773.483	12 Bulan	21.778.926	12 Bulan	21.784.371	12 Bulan	21.789.817	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
		Hasil :	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran :	Jumlah bulan penyediaan anggaran untuk Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.450.000	12 Bulan	66.450.000	12 Bulan	66.466.613	12 Bulan	66.483.229	12 Bulan	66.499.850	12 Bulan	66.516.475	12 Bulan	66.533.104	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
		Hasil :	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**-**	100%	**25.400.000**	100%	**25.406.350**	100%	**25.412.702**	100%	**105.419.055**	100%	**95.425.410**	100%	**75.431.766**	**Kantor Kecamatan Kayan Hilir**	**Kayan Hilir**
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran :	Jumlah Kendaraan Roda Dua yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
		Hasil :	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Keluaran :	Jumlah jenis mebel yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	5 Jenis	30.000.000	5 Jenis	30.000.000	-	-	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
		Hasil :	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran :	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	2 Jenis	10.000.000	-	-	2 Jenis	10.000.000	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
		Hasil :	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran :	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	2 Unit	25.400.000	2 Unit	25.406.350	2 Unit	25.412.702	2 Unit	25.419.055	2 Unit	25.425.410	2 Unit	25.431.766	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir

		Hasil : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**115.085.000**	100%	**117.585.000**	100%	**118.683.850**	100%	**118.712.896**	100%	**118.741.949**	100%	**118.771.010**	100%	**118.800.077**	**Kantor Kecamatan Kayan Hilir**	**Kayan Hilir**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jumlah Materai 10.000 yang disediakan	-	250 Lembar	2.500.000	250 Lembar	2.500.000	250 Lembar	2.500.000	250 Lembar	2.500.000	250 Lembar	2.500.000	250 Lembar	2.500.000	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
		Hasil : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000	12 Bulan	9.000.000	12 Bulan	9.002.250	12 Bulan	9.004.501	12 Bulan	9.006.752	12 Bulan	9.009.003	12 Bulan	9.011.256	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
		Hasil : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Jumlah Tenaga Kontrak yang disediakan	106.085.000	6 Orang	106.085.000	6 Orang	107.181.600	6 Orang	107.208.395	6 Orang	107.235.197	6 Orang	107.262.006	6 Orang	107.288.822	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
		Hasil : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**6.500.000**	100%	**6.500.000**	100%	**16.662.500**	100%	**36.502.500**	100%	**51.667.501**	100%	**52.216.564**	100%	**52.779.169**	**Kantor Kecamatan Kayan Hilir**	**Kayan Hilir**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran :	Jumlah Kendaraan Roda 2 Yang memiliki STNK dan Surat Ketetapan Pajak	-	0	0	8 Unit	10.000.000	8 Unit	10.002.500	8 Unit	10.005.001	8 Unit	10.007.502	8 Unit	10.010.004	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
			Jumlah Kendaraan Roda 4 yang memiliki STNK dan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan		0		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit			
		Hasil :	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran :	Jumlah Kendaraan Roda 2 yang Dipelihara	-	0	0	0	-	8 Unit	20.000.000	8 Unit	20.000.000	8 Unit	20.005.000	8 Unit	20.010.001	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
			Jumlah Kendaraa Roda 4 yang dipelihara		0		0		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit			
		Hasil :	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran :	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	6.500.000	4 Jenis	6.500.000	4 Jenis	6.662.500	4 Jenis	6.500.000	4 Jenis	6.662.500	4 Jenis	6.829.063	4 Jenis	6.999.789	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
		Hasil :	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

			7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.375.000	1 Unit	15.759.375	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
					Hasil : Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		2.Meningkatnya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		-	100%	**2.070.000**	100%	**2.121.750**	100%	**32.174.794**	100%	**32.182.837**	100%	**32.190.883**	100%	**32.198.931**	**Kantor Kecamatan Kayan Hilir**	**Kayan Hilir**
			7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	-	0%	**-**	0%	**-**	100%	**5.000.000**	100%	**5.001.250**	100%	**5.002.500**	100%	**5.003.751**	**Kantor Kecamatan Kayan Hilir**	**Kayan Hilir**
			7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (administrasi kependudukan, operasi pasar, KIAT Guru, Porseni, Distribusi Raskin/Ranstra, dll) yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan	5.001.250	1 Kegiatan	5.002.500	1 Kegiatan	5.003.751	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir

		Hasil :	Terlaksanaanya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**-**	100%	**2.070.000**	100%	**2.121.750**	100%	**5.174.794**	100%	**5.176.087**	100%	**5.177.381**	100%	**5.178.676**	**Kantor Kecamatan Kayan Hilir**	**Kayan Hilir**
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Keluaran :	Jumlah Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan yang dilaksanakan	-	1 Kegiatan	2.070.000	1 Kegiatan	2.121.750	1 Kegiatan	2.174.794	1 Kegiatan	2.175.337	1 Kegiatan	2.175.881	1 Kegiatan	2.176.425	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
		Hasil :	Terlaksanaanya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran :	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	3.000.000	1 Kegiatan	3.000.750	1 Kegiatan	3.001.500	1 Kegiatan	3.002.251	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
		Hasil :	Terlaksanaanya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

			7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**-**	0%	**-**	0%	**-**	100%	**22.000.000**	100%	**22.005.500**	100%	**22.011.001**	100%	**22.016.504**	**Kantor Kecamatan Kayan Hilir**	**Kayan Hilir**
			7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan	Keluaran :	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non usaha	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	10.002.500	1 Kegiatan	10.005.001	1 Kegiatan	10.007.502	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
					Hasil :	Terlaksanaanya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Keluaran :	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Non perijinan	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	9.000.000	1 Kegiatan	9.002.250	1 Kegiatan	9.004.501	1 Kegiatan	9.006.752	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
					Hasil :	Terlaksanaanya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Keluaran :	Jumlah KegiatanPelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	3.000.000	1 Kegiatan	3.000.750	1 Kegiatan	3.001.500	1 Kegiatan	3.002.251	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
					Hasil :	Terlaksanaanya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**-**	0%	**-**	0%	**-**	100%	**20.000.000**	100%	**20.005.000**	100%	**20.010.001**	100%	**20.015.004**	**Kantor Kecamatan Kayan Hilir**	**Kayan Hilir**

			7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**-**	0%	**-**	0%	**-**	100%	**15.000.000**	100%	**15.003.750**	100%	**15.007.501**	100%	**15.011.253**	**Kantor Kecamatan Kayan Hilir**	**Kayan Hilir**
			7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Keluaran : Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	2 Kegiatan	10.000.000	2 Kegiatan	10.002.500	2 Kegiatan	10.005.001	2 Kegiatan	10.007.502	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
					Hasil : Terlaksanany a Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketentraman dan Ketertiban Umum		0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Keluaran : Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan	5.001.250	1 Kegiatan	5.002.500	1 Kegiatan	5.003.751	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
					Hasil : Terlaksanany a Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketentraman dan Ketertiban Umum		0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada**	**Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada**		**-**	0%	**-**	0%	**-**	100%	**5.000.000**	100%	**5.001.250**	100%	**5.002.500**	100%	**5.003.751**	**Kantor Kecamatan Kayan Hilir**	**Kayan Hilir**
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Keluaran :	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan	5.001.250	1 Kegiatan	5.002.500	1 Kegiatan	5.003.751	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
		Hasil :	Terlaksanany a Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**-**	0%	**-**	100%	**25.000.000**	100%	**25.006.250**	100%	**25.012.502**	100%	**25.018.755**	100%	**25.025.009**	**Kantor Kecamatan Kayan Hilir**	**Kayan Hilir**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**-**	0%	**-**	100%	**25.000.000**	100%	**25.006.250**	100%	**25.012.502**	100%	**25.018.755**	100%	**25.025.009**	**Kantor Kecamatan Kayan Hilir**	**Kayan Hilir**

			7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Keluaran :	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional yang dilaksanakan	-	-	-	1 Kegiatan	15.000.000	1 Kegiatan	15.003.750	1 Kegiatan	15.007.501	1 Kegiatan	15.011.253	1 Kegiatan	15.015.006	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
					Hasil :	Terlaksanany a Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Keluaran :	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	-	-	-	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	10.002.500	1 Kegiatan	10.005.001	1 Kegiatan	10.007.502	1 Kegiatan	10.010.004	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
					Hasil :	Terlaksanany a Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6.3	Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa	3.Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			-	0%	-	0%	-	100%	**35.000.000**	100%	**35.008.750**	100%	**35.017.502**	100%	**35.026.257**	**Kantor Kecamatan Kayan Hilir**	**Kayan Hilir**

			7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**-**	0%	**-**	0%	**-**	100%	**35.000.000**	100%	**35.008.750**	100%	**35.017.502**	100%	**35.026.257**	**Kantor Kecamatan Kayan Hilir**	**Kayan Hilir**
			7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Keluaran :	Jumlah Desa sasaran Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	-	-	-	30 Desa	10.000.000	35 Desa	10.002.500	40 Desa	10.005.001	43 Desa	10.007.502	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
					Hasil :	Terlaksanaanya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Keluaran :	Jumlah Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	15.000.000	1 Kegiatan	15.003.750	1 Kegiatan	15.007.501	1 Kegiatan	15.011.253	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
					Hasil :	Terlaksanaanya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran :	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	10.002.500	1 Kegiatan	10.005.001	1 Kegiatan	10.007.502	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir

				Hasil :	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**15.000.000**	100%	**17.000.000**	100%	**40.003.750**	100%	**102.013.751**	100%	**100.038.754**	100%	**100.063.764**	100%	**100.088.780**	**Kantor Kecamatan Kayan Hilir**	**Kayan Hilir**
			7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**15.000.000**	100%	**17.000.000**	100%	**40.003.750**	100%	**102.013.751**	100%	**100.038.754**	100%	**100.063.764**	100%	**100.088.780**	**Kantor Kecamatan Kayan Hilir**	**Kayan Hilir**
			7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Keluaran : Jumlah Desa yang menjadi sasaran Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	-	-	-	-	43 Desa	10.000.000	43 Desa	10.002.500	43 Desa	10.005.001	43 Desa	10.007.502	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
					Hasil : Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Keluaran : Jumlah Desa sasaran Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	43 Desa	10.000.000	43 Desa	10.002.500	43 Desa	10.005.001	43 Desa	10.007.502	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir

					Hasil :	Terlaksanaanya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Keluaran :	Jumlah Desa sasaran Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	-	43 Desa	15.000.000	43 Desa	15.003.750	43 Desa	15.007.501	43 Desa	15.011.253	43 Desa	15.015.006	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
					Hasil :	Terlaksanaanya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Keluaran :	Jumlah Desa sasaran Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	43 Desa	10.000.000	43 Desa	10.002.500	43 Desa	10.005.001	43 Desa	10.007.502	43 Desa	10.010.004	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
					Hasil :	Terlaksanaanya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Keluaran :	Jumlah Desa yang difasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	2 Desa	2.000.000	-	-	2 Desa	2.000.000	-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir

				Hasil :	Terlaksanany a Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
		7.01.06.2. 01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Keluaran :	Jumlah Desa yang difasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawar atan Desa	-	-	-	-	-	5 Desa	10.000.000	10 Desa	10.002.500	15 Desa	10.005.001	20 Desa	10.007.502	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
				Hasil :	Terlaksanany a Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		7.01.06.2. 01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Keluaran :	Jumlah Desa sasaran fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah dengan Pembanguna n Desa	15.000.000	43 Desa	15.000.000	43 Desa	15.003.750	43 Desa	15.007.501	43 Desa	15.011.253	43 Desa	15.015.006	43 Desa	15.018.759	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
				Hasil :	Terlaksanany a Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		7.01.06.2. 01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Keluaran :	Jumlah Desa sasaran Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayaguna an Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	-	-	-	-	30 Desa	15.000.000	35 Desa	15.003.750	40 Desa	15.007.501	43 Desa	15.011.253	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir

					Hasil :	Terlaksanarya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Keluaran :	Jumlah Desa yang difasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	-	-	43 Desa	10.000.000	43 Desa	10.002.500	43 Desa	10.005.001	43 Desa	10.007.502	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
					Hasil :	Terlaksanarya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Keluaran :	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Kecamatan Kayan Hilir	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan	5.001.250	1 Kegiatan	5.002.500	1 Kegiatan	5.003.751	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Kayan Hilir
					Hasil :	Terlaksanarya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu Instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya, serta akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Penetapan indikator kinerja dan capaian sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu capaian serta ketersediaan penganggarannya.

Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan Kayan Hilir untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi, yang secara khusus mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat Kecamatan dari sisi Sumber Daya Manusia, Pelayanan Publik, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Kayan Hilir yang mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Dokumen Perencanaan yang diselesaikan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Jumlah bulan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
3	Jumlah Buku Cek	-	-	-	4 buku	4 buku	4 buku	4 buku
4	Jumlah Pulsa OPT	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
5	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang diselesaikan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
6	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan	-	-	-	27 Stel	-	-	27 Stel
7	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat berdasarkan Tugas dan Fungsinya	-	-	-	2 Orang	1 Orang	2 Orang	1 Orang
8	Jumlah jenis Komponen Listrik yang disediakan	-	-	-	5 Jenis	-	10 Jenis	-
9	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	-	45 Jenis	45 Jenis	45 Jenis	45 Jenis	45 Jenis	45 Jenis
10	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	-	-	-	17 Jenis	-	17 Jenis	-
11	Jumlah Bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan

12	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
13	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
14	Jumlah bulan penyediaan anggaran untuk Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
15	Jumlah Kendaraan Roda Dua yang disediakan	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit
16	Jumlah jenis mebel yang disediakan	-	-	-	-	5 Jenis	5 Jenis	-
17	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-	-	-	2 Jenis	-	2 Jenis
18	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
19	Jumlah Materai 10.000 yang disediakan	-	250 Lembar	250 Lembar	250 Lembar	250 Lembar	250 Lembar	250 Lembar
20	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
21	Jumlah Tenaga Kontrak yang disediakan	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang
22	Jumlah Kendaraan Roda 2 Yang memiliki STNK dan Surat Ketetapan Pajak	-	-	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit
23	Jumlah Kendaraan Roda 4 yang memiliki STNK dan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
24	Jumlah Kendaraan Roda 2 yang dipelihara	-	-	-	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit
25	Jumlah Kendaraa Roda 4 yang dipelihara	-	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

26	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis
27	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit
28	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (administrasi kependudukan, operasi pasar, KIAT Guru, Porseni, Distribusi Raskin/Ranstra, dll) yang dilaksanakan	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
29	Jumlah Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan yang dilaksanakan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
30	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
31	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non usaha	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
32	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Non perijinan	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
33	Jumlah KegiatanPelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
34	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	-	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
35	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

36	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
37	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional yang dilaksanakan	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
38	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
39	Jumlah Desa sasaran Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	-	30 Desa	35 Desa	40 Desa	43 Desa
40	Jumlah Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan yang dilaksanakan	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
41	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
42	Jumlah Desa yang menjadi sasaran Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	-	-	43 Desa	43 Desa	43 Desa	43 Desa
43	Jumlah Desa sasaran Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	43 Desa	43 Desa	43 Desa	43 Desa
44	Jumlah Desa sasaran Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	43 Desa	43 Desa	43 Desa	43 Desa	43 Desa

45	Jumlah Desa sasaran Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	43 Desa	43 Desa	43 Desa	43 Desa	43 Desa
46	Jumlah Desa yang difasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	2 Desa	-	2 Desa	-	-	-
47	Jumlah Desa yang difasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-	-	-	5 Desa	10 Desa	15 Desa	20 Desa
48	Jumlah Desa sasaran fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	43 Desa	43 Desa	43 Desa	43 Desa	43 Desa	43 Desa	43 Desa
49	Jumlah Desa sasaran Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	-	-	30 Desa	35 Desa	40 Desa	43 Desa
50	Jumlah Desa yang difasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	43 Desa	43 Desa	43 Desa	43 Desa
51	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Kecamatan Kayan Hilir	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

BAB VIII
PENUTUP

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renstra diharapkan dapat memberikan arahan, pedoman dan sekaligus menjadi instrumen pengawasan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Kayan Hilir selama lima tahun ke depan. Aparatur Kecamatan Kayan Hilir diharapkan mampu mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara terencana dan terkoordinasi yang disertai dengan komitmen yang kuat, konsisten, mampu bekerjasama dan bertanggung jawab dari seluruh aparatur. Renstra Kecamatan Kayan Hilir ini juga menunjukkan adanya komitmen Kecamatan Kayan Hilir untuk menunjang komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang dalam mewujudkan visi dan misinya.

Akhir kata, sangat kami sadari bahwa Renstra Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2021-2026 ini masih jauh dari kesempurnaan, namun kami berharap kiranya Renstra ini dapat kami laksanakan dalam mendukung Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sintang kedepannya, dan semoga Dokumen Renstra ini dapat dijadikan sumber informasi dalam pengambilan keputusan, guna peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang dimasa mendatang.

Monbai Begununk, 10 April 2025.

Plt.Camat Kayan Hilir

SEBERIUS MATIUS AKON,S.Pd.SD.,M.E
PEMBINA IV/ A
NIP. 19690710 199110 1 002